

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Syadana Juni Ariyanti
rasyasyadana@gmail.com
Ikhsan Budi Riharjo
Titik Mildawati

Program S2 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This study aims to analyze and test the influencing factors on the timeliness of financial reporting that is moderated by supervision. Moreover, the independent variables were the effect of understanding the regulations (PPR), organizational commitment (KOR), utilization of information technology (PTI), human resource competencies (SDM) and internal control (PIN), the dependent variable was the timeliness of financial reporting (KLP) and moderated by supervision (PWS). The population this study includes staff at OPD in the Sidoarjo Regency. In this study, based on purposive sampling criteria obtained 91 employees. Data collection techniques in this study used a questionnaire. The type of data used is primary data collected sending questionnaires to respondents. The analysis technique uses Moderating Regression Analysis (MRA). The results of this study indicate that understanding of regulations, organizational commitment, utilization of information technology, human resource competencies and internal control have a positive effect, while supervisory variables as a moderating factor can strengthen the influence between understanding regulations, organizational commitment, utilization of information technology, resource competencies human and internal control over the timeliness of financial reporting.

Keywords : *Influencing factors, supervision, Timeliness*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dimoderasi pengawasan. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah Pemahaman peraturan (PPR), Komitmen Organisasi (KOR), Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan Pengendalian Internal (PIN) sebagai variabel independen, Kualitas Laporan Keuangan (KLP) sebagai variabel dependen dan Pengawasan (PWS) sebagai variabel pemoderasi. Populasi penelitian meliputi Staf/pegawai pada Kabupaten Sidoarjo dengan pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* diperoleh 91 pegawai. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui pengiriman kuesioner kepada responden. Teknik analisis *Moderating Regression Analysis* (MRA). Hasil

penelitian ini menunjukkan pemahaman peraturan, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian intern mempunyai pengaruh positif, sedangkan variabel pengawasan dapat memoderasi antara pemahaman peraturan, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata kunci : faktor-faktor yang mempengaruhi, pengawasan, kualitas laporan keuangan.

PENDAHULUAN

Dalam organisasi sektor publik, laporan keuangan yang dipublikasikan merupakan alat pertanggungjawaban pemerintah yang nantinya dapat dipergunakan dalam mengambil keputusan oleh beberapa pihak yang membutuhkan (Astrawan,2016). Dalam Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang ada di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa lampau atau masa sekarang, dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi di masa lampau.

Teori keagenan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam kegiatan organisasi sektor publik khususnya dalam praktek pelaporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah sebagai pihak *agent* dalam mengoptimalkan kinerja keuangan pemerintah kepada publik. Pemerintah dituntut untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas sehingga dapat memberikan informasi yang andal dan akurat sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai *principal*. Salah satu strategi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik membagi pekerjaan kedalam satuan kerja termasuk didalamnya adalah satuan kerja ditingkat daerah yang disebut Organisasi Perangkat Daerah (Faristina, 2011).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan mendapatkan penilaian dalam setiap tahunnya yang nantinya akan didapatkan opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK), adapun opini yang dikeluarkan oleh BPK seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang ada pada suatu Pemerintahan telah tersaji dan telah diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat empat opini antara lain (1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), (2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), (3) Opini Tidak Wajar (TP), dan (4) Pernyataan Menolak memberi Opini (TMP). Peraturan Pemerintah No. 24 Th 2005, menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengeluarkan opini sesuai dengan kualitas pelaporan keuangan yang berisi tentang informasi yang digunakan oleh pengguna untuk pengambilan keputusan.

Penyusunan laporan keuangan pada daerah saat ini terdapat kendala dalam proses penyusunannya, hal itu disebabkan oleh kompetensi dari sumber daya manusia yang ada yaitu aparatur daerah. Hal ini dapat disebabkan orang yang

terlibat dalam penyusunan laporan keuangan tidak memiliki latar belakang dengan pendidikan akuntansi, sehingga terdapat kendala bagi beberapa pihak yang akan menyampaikan laporannya dikarenakan pegawai belum sepenuhnya siap dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga tidak memenuhi kaidah pelaporan keuangan normatif sesuai yang disyaratkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) (Eriva *et al.*, 2013).

Fenomena terkait kualitas pelaporan keuangan Kabupaten Sidoarjo, walaupun telah mendapatkan opini WTP dari BPK namun masih terdapat temuan dan penyimpangan yang berhasil diungkap oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berkaitan dengan SPI (Sistem Pengendalian Intern) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan atas LHP BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2013- tahun 2018 telah mendapatkan pernyataan Wajar Tanpa Pengecualian (tribunnews.com Kamis, 23 Mei 2019) bahwasannya Bupati Sidoarjo, Bapak Saiful Ilah telah menerima langsung LHP LKPD dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Hari Purwaka dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pada pemberitaan tersebut BPK mengemukakan predikat opini WTP yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah keenam kalinya karena mampu dianggap baik dalam menerapkan Standart Pengendalian Internal sehingga mampu meminimalkan tingkat penyimpangan maupun kesalahan secara materiil. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai informasi, dimana informasi yang dihasilkan hendaknya informasi yang berkualitas untuk disampaikan kepada manajemen dalam pengambilan keputusan maupun dapat digunakan sebagai dorongan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dimana hal itu dapat digunakan dalam memahami peraturan yang berlaku, selain itu komitmen organisasi dan penggunaan teknologi informasi yang efektif melalui sistem informasi yang ada.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diungkapkan maka dapat diketahui masih terdapatnya kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini akan dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sidoarjo yang merupakan salah satu kabupaten/kota di Jawa Timur yang meraih predikat WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018 dan untuk mempertahankan predikat tersebut pada periode atau tahun selanjutnya.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Keagenan

Teori agensi menurut Jensen dan Smith (1984), merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principal dan agen. Pihak principal adalah pihak pemberi kewenangan kepada agent, untuk melakukan semua kegiatan atas nama principal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Dalam sektor pemerintahan, legislatif sebagai prinsipal dan eksekutif sebagai agen yang dijelaskan pada teori keagenan. Hubungan ini dapat berperilaku oportunistik

yang dilakukan oleh eksekutif dimana eksekutif merupakan sebagai pembuat dan pelaksana anggaran. Model keagenan yang sederhana diasumsikan dua pilihan dalam kontrak: (1) *behavior-based*, yakni prinsipal wajib memonitor perilaku agen dan (2) *outcome-based*, yakni pemberian insentif sebagai tindakan motivasi untuk agen dalam mencapai kepentingan principal (Car dan Brower, 2000).

Kualitas Laporan Keuangan (KLP)

Informasi yang tepat waktu jika informasi yang disampaikan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan dan tidak ada yang dirubah (Ang, 1997). Kualitas atau timeliness yang mempunyai arti penting dalam penyajian informasi yang relevan, sedangkan karakteristik informasi yang relevan memiliki nilai prediktif dan disajikan sesuai dengan waktu yang ada. Laporan keuangan yang memiliki informasi akan memiliki manfaat jika informasi yang ada dapat digunakan oleh pembuat keputusan dalam pengambilan keputusan. Zuliarti (2012), menyatakan bahwa informasi yang ditunda tidak sebagaimana mestinya maka informasi yang dihasilkan dapat kehilangan relevansinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa setiap entitas pelaporan mempunyai keharusan untuk melaporkan upaya-upaya yang dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: (1) Akuntabilitas; (2) Manajemen; (3) Transparansi; (4) Keseimbangan Antargenerasi; (5) Evaluasi Kinerja.

Pemahaman Peraturan (PPR)

Pemahaman peraturan yang diterapkan berdasarkan atas Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang harus dipatuhi baik pemerintah pusat maupun daerah. SAP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas untuk melaporkan upaya yang dilakukan serta pencapaian hasil dalam melaksanakan kegiatan baik secara sistematis maupun terstruktur dalam satu periode pelaporan guna kepentingan akuntabilitas, transparansi dan manajemen daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Komitmen Organisasi (KOR)

Menurut Eker (2007), komitmen organisasi yaitu suatu penyerta, yang memberi pengaruh pada tujuan dan nilai, serta kepentingan pada organisasi, terlepas dari instrumental yang semata-mata cukup, ditinjau dari konsep menurut tiga dimensi, yaitu identifikasi, keterlibatan, dan kesetiaan. Komitmen organisasi diartikan sebagai perpaduan antara sikap dan perilaku. Komitmen organisasi terbentuk atas dasar adanya komitmen karyawan (individu). Komitmen organisasi menurut Suryanawa (2008) merupakan suatu dorongan dalam diri individu berbuat sesuatu sehingga menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan sendiri. Dari pengertian di atas, disimpulkan bahwa komitmen organisasi merupakan suatu keadaan individu berkeyakinan, memiliki keterikatan, serta perasaan memiliki atas perusahaan sehingga individu tersebut lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan individu.

Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)

Pemanfaatan teknologi informasi yaitu peranan penting menjalankan sistem informasi sehingga peranan yang memadai harus didukung dengan ketersedianya perangkat komputer baik hardware maupun software yang mampu menghasilkan informasi, berupa laporan keuangan berkualitas sesuai penerapan standar khusus. Jika ditinjau dari total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) dari tahun ketahun menunjukkan adanya peningkatan. Untuk itu pemerintah diharuskan untuk mengembangkan serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang diatur menurut PP Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan untuk meningkatkan kemajuan keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas sumber daya manusia adalah suatu kesatuan tenaga manusia sebagai suatu sistem bahwa tiap karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan informasi serta diukur berdasarkan latar belakang pendidikan, Rumenser (2014). Pendidikan dan pelatihan sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi karena pendidikan dan pelatihan merupakan suatu upaya untuk pengembangan sumber daya manusia agar kemampuan dan pengetahuannya tidak tergerus terus menerus seiring kemajuan dan perkembangan teknologi. Arfianti (2011) menyatakan sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting, oleh sebab itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Apabila disuatu pemerintahan terdapat sumber daya manusia yang berkualitas tentu akan menjadikan daerah tersebut menjadi daerah yang makmur, karena bagi perekonomian negara, kesuksesan suatu pemerintahan akan menjadikan perekonomian suatu negara lebih baik.

Pengendalian Intern (PIN)

Menurut Krismiaji (2010: 218) sistem pengendalian intern merupakan perencanaan organisasi, cara dan alat yang dikoordinasikan untuk dipergunakan dalam perusahaan sehingga mampu menjaga keamanan kekayaan perusahaan, serta sebagai pemeriksa kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi agar kebijakan manajemen yang telah ditetapkan dapat dipatuhi. Keefektifan pengendalian intern mempunyai pengaruh yang besar dalam upaya pencegahan kecenderungan kecurangan akuntansi, dengan adanya pengendalian internal maka pengecekan akan terjadi secara otomatis terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain. Di Indonesia sendiri perkembangan pengendalian internal khususnya pada entitas pemerintah ditandai dengan diterbitkannya PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pengawasan (PWS)

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan dengan efektif dan efisien sesuai atas rencana serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010, dimana suatu bentuk upaya secara

sistematik untuk menetapkan kinerja standar yang bertujuan sebagai sistem umpan balik informasi yang dijadikan sebagai dasar pembandingan antara kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan sehingga menghindari adanya kemungkinan penyimpangan yang terjadi (Yosa, 2010). Dalam keterkaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan dilakukan untuk membangun serta menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan menciptakan pengawasan efektif, baik ekstern maupun intern.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Pemahaman Peraturan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kepatuhan sebagaimana diargumentasikan dalam Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan diwujudkan melalui penyampaian laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Andini dan Yusrawati, 2015). Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah daerah (Rahayu *et al.*, 2014). Menurut Bastian (2007:4) perlu pemahaman terhadap sistem akuntansi untuk dapat memahami dengan baik penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan (Mardiasmo, 2004:56). Temuan studi sebelumnya menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Dasmaran *et al.*, 2017; Putri, 2017; Defitri, 2018). Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pemahaman peraturan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Stewardship Theory menyatakan bahwa kepentingan organisasi manajemen termotivasi untuk lebih fokus pada sasaran utama daripada tujuan individu. Luthans (2006) menyatakan bahwa keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi merupakan komitmen organisasi. Lebih lanjut Jaros (2007) mengungkapkan komitmen organisasi dibangun atas dasar kepercayaan pekerja terhadap nilai-nilai organisasi tersebut, kerelaan pekerja membantu mencapai tujuan organisasi serta bertindak loyalitas untuk tetap bertahan sebagai anggota organisasi. Temuan studi sebelumnya yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Lestari *et al.*, 2017; Arif, 2017; dan Rini *et al.*, 2019). Dengan adanya komitmen organisasi yang tinggi akan mempunyai dampak pada karyawan yang akan tetap tinggal dalam organisasi dan akan selalu

meningkatkan kualitas kerjanya dan juga akan menghasilkan kualitas pelaporan keuangan yang tinggi. Dengan demikian dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemanfaatan teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan data transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya menjadi tepat waktu. Temuan studi sebelumnya yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Nurlilah., 2014; Setyowati et al., 2016; dan Putri, 2017). Dengan adanya teknologi informasi membantu pemerintah daerah untuk dapat mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang digunakan untuk dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada layanan publik.. Dengan demikian dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi sumber daya manusia penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan sehingga laporan keuangan yang disusun dapat tepat waktu. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap ketepatan pelaporan keuangan kapasitas sumber daya manusia dapat terlihat dari tingkat tanggung jawab yang diberikan kepadanya, yang mana tanggungjawab tersebut diuraikan didalam job description. Dalam pengelolaan keuangan, OPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang didukung oleh latar belakang pendidikan akuntansi, pengalaman kerja di bidang keuangan dan mengikuti pelatihan kerja. Kualitas sumber daya manusia adalah suatu kesatuan tenaga manusia yang menjadikan latar belakang pendidikan pegawai sebagai tolok ukur dalam memperoleh suatu informasi, Rumenser (2014). Temuan studi sebelumnya yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Setyowati *et al.*, 2016; Putri, 2017; dan Nugroho, 2018). Dengan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang sesuai dengan pemahaman sistem akuntansi yang baik maka akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan kualitas dalam pembuatannya. Dengan demikian dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Salah satu hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah dengan adanya sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern dapat terdiri dari kebijakan dan tatanan yang diterapkan untuk mencapai

sasaran dan menyediakan laporan keuangan secara handal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SPIP merupakan suatu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh pada lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP Nomor 60 Tahun 2008). SPIP juga merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya manusia pada suatu organisasi yang turut berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan secara dini. Temuan studi sebelumnya menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Surastiani dan Handayani, 2015; Sari *et al.*, 2017; dan Nugroho, 2018). Dengan adanya pengendalian intern yang diberlakukan sesuai dengan peraturan maka dapat memberikan suatu keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang dapat digambarkan dengan kualitas laporan keuangan yang baik. Dengan demikian dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Pengaruh Interaksi Pemahaman Peraturan dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Akuntansi keuangan daerah adalah proses mengidentifikasi, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (Abdul, 2010). Berdasarkan Kemendagri No. 29 Tahun 2002 prosedur sistem akuntansi terdiri dari pencatatan, penggolongan, pengintisarian dan pelaporan. Latifah dan Ridwan (2012) menyatakan ruang lingkup sistem akuntansi keuangan daerah meliputi kebijakan sistem akuntansi, prosedur sistem akuntansi, sumber daya manusia dan teknologi informasi dan menunjukkan hasil bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang efektif akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Namun selain sistem akuntansi hal yang tidak dapat dipisahkan dalam memperoleh kualitas laporan keuangan yang baik yaitu pengawasan keuangan. Pengawasan diperlukan sebagai progres perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis (Arfianti, 2011). Dengan demikian dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆: Pengawasan memoderasi pengaruh pemahaman peraturan terhadap kualitas laporan keuangan

Pengaruh Interaksi Komitmen Organisasi dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Komitmen organisasi merupakan keterkaitan individu dalam organisasi sehingga “merasa memiliki” organisasi tempatnya bekerja (Supriyono, 2004). Selain itu, komitmen organisasi dapat diartikan sebagai pengabdian individual terhadap tujuan dan nilai yang dianut organisasi tertentu (Sunjoyo, 2008). Komitmen organisasi merupakan suatu pengikat, yang memberi pengaruh pada tujuan dan nilai, serta kepentingan pada organisasi, terlepas dari instrumental yang semata-mata cukup, ditinjau dari konsep menurut tiga dimensi, yaitu identifikasi, keterlibatan, dan kesetiaan. Komitmen organisasi terbentuk pada dasarnya adanya

komitmen karyawan (individu). Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurangnya pengawasan yang dilakukan akan menyebabkan kelalaian dalam pembuatan pelaporan keuangan daerah, sehingga kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan, kurangnya komitmen terhadap kompetensi, belum optimalnya kegiatan identifikasi risiko, dan analisis risiko, lemahnya pengendalian fisik atas aset serta pencatatan transaksi yang kurang akurat, dan tidak tepat waktu. Dengan demikian dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₇: Pengawasan memoderasi pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan

Pengaruh Interaksi Pemanfaatan Teknologi Inoformasi dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemanfaatan teknologi yang baik oleh pemerintah merupakan salah satu manfaat yang dapat mengurangi kesalahan yang terjadi pada peningkatan kinerja pegawai pemerintah. Dampak positif dari pemanfaatan teknologi informasi secara umum dapat menambah efisiensi waktu dan biaya serta memberikan keuntungan ekonomis yang tinggi jika teknologi di manfaatkan secara optimal. Tersedianya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurangnya pengawasan yang dilakukan akan menyebabkan kelalaian dalam pembuatan pelaporan keuangan daerah, sehingga kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan, kurangnya komitmen terhadap kompetensi, belum optimalnya kegiatan identifikasi risiko, dan analisis risiko, lemahnya pengendalian fisik atas aset serta pencatatan transaksi yang kurang akurat, dan tidak tepat waktu (Trisaputra, 2013). Dengan demikian dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₈: Pengawasan memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan

Pengaruh Interaksi Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan pemerintah RI nomor 71 tahun 2010 mengatakan mudah dipahami merupakan salah satu indikator berkualitasnya LKPD, hal ini berkaitan erat dengan SDM yang menghasilkannya. Staf dalam hal ini sebagai SDM dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang akuntansi atau paling tidak mempunyai semangat dan niat untuk terus belajar mengasah kemampuannya dibidang ekonomi. Latar belakang pendidikan sangatlah penting karena dengan pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat yang dituntut dari suatu pekerjaan. Arfianti (2011) menyatakan sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan merupakan bagian penting dalam praktik pengawasan dalam kinerja sumber daya manusia pada pemerintahan, karena dengan diberlakukannya pengawasan maka dapat dilakukan evaluasi dan diharapkan dapat memberi rekomendasi mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan (Putra, 2018). Pengawasan dapat dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan internal pemerintahan maupun yang berasal dari luar pemerintahan, sehingga dapat meminimalisir gagalnya sumber daya manusia pemerintahan dalam memahami tentang laporan yang telah ditetapkan pemerintah, selain itu pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dengan demikian dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₉: Pengawasan memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan

Pengaruh Interaksi Pengendalian Intern dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengendalian intern adalah segala sesuatu meliputi struktur organisasi, semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan dalam perusahaan dengan tujuan menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Pengendalian intern digunakan untuk mengurangi ancaman dan risiko terhadap sistem informasi akuntansi, diperlakukan suatu sistem pengendalian intern yang dirancang dan dijalankan dengan baik. Tanpa sistem pengendalian intern, sistem akan mudah dirusak atau mudah digunakan orang lain yang tidak berhak. Pengendalian intern dalam rencana organisasi dan semua ukuran dan metode terkoordinasi yang diterapkan dalam suatu perusahaan untuk melindungi aktiva, menjaga keakurasian dan keterpercayaan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepatuhan kebijakan manajemen. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan, maka diharapkan dapat membantu dalam mengelola keuangan pemerintahan. Pengawasan dapat memberikan keyakinan

yang memadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien (Lestari *et al.*, 2017). Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Dengan demikian dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁₀: Pengawasan memoderasi pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer untuk menguji kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang ditinjau dari pemahaman peraturan, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, pengendalian intern, pengawasan keuangan daerah yang diperoleh dengan cara bantuan instrumen kuisioner serta wawancara. Objek pada penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Populasi dari penelitian ini yaitu staf/pegawai pada OPD Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dengan asumsi bahwa semua staf atau pegawai memahami semua kegiatan penatausahaan pada OPD Pemkab. Sidoarjo.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel pada penelitian ini adalah staf atau pegawai yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria responden dalam penelitian ini yaitu (1) staf/pegawai pada OPD Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang berstatus ASN; (2) pegawai yang berkedudukan sebagai pejabat penatausahaan keuangan (PPK) pada masing-masing OPD pada Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo; dan (3) memiliki masa kerja minimal dua tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara memberikan kuisioner yang diberikan langsung kepada para pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini peneliti menyediakan pertanyaan mengenai pemahaman peraturan, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, pengendalian intern serta pengawasan keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang merujuk pada kuesioner yang dikembangkan oleh Nugroho (2018). Responden diminta untuk menyatakan setuju atau tidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Variabel Dependen

Kualitas Laporan Keuangan (KLP)

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) 71 Tahun 2010 kualitas yaitu ketersediaan suatu informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan dalam mempengaruhi keputusan yang diambil. Instrumen pertanyaan tersebut antara lain mengenai (1) penyampaian Laporan Triwulan paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir; (2) penyampaian laporan semesteran paling lambat tanggal 10 setelah semester berakhir; dan (3) penyampaian laporan tahunan paling lambat tanggal 20 setelah tahun berakhir.

Variabel Independen

Pemahaman Peraturan (PPR)

Pemahaman peraturan merupakan suatu kemampuan seseorang dalam memahami serta mampu menerapkan suatu peraturan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Instrumen pertanyaan tersebut antara lain mengenai (1) basis akuntansi; (2) nilai historis yang terdiri atas penilaian aset dan kewajiban; (3) realisasi yang merupakan dari konsep layak temu biaya dan pendapatan; (4) penyajian transaksi secara wajar dan penyajian peristiwa lainnya; (5) periode pelaporan; (6) konsistensi dalam penerapan metode akuntansi; (7) pengungkapan secara lengkap atas informasi laporan keuangan; dan (8) penyajian laporan keuangan atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Komitmen Organisasi (KOR)

Komitmen organisasi adalah keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan tertentu dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi (Luthans, 2006). Instrumen pertanyaan tersebut antara lain mengenai (1) keinginan sebagai manajemen puncak (pimpinan OPD); (2) perlunya membenahi akan kurangnya keterampilan staf untuk mendukung penerapan transparansi pelaporan keuangan; (3) perlunya pendidikan yang berkelanjutan dalam internal OPD untuk menghadapi perubahan lingkungan yang semakin kompleks; (4) keinginan membangun budaya etis dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan di OPD; dan (5) kebutuhan OPD akan partisipasi masyarakat.

Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan pemrosesan, pengolahan dan penyebaran data yang didapat dari meng-kombinasikan alat perangkat komputer dengan telekomunikasi (Jurnali dan Supomo, 2002). Instrumen pertanyaan tersebut antara lain mengenai (1) *software* aplikasi; (2) proses akuntansi secara terkomputerisasi; (3) *software* sesuai peraturan perundangan; (4) laporan akuntansi yang terintegrasi; (5) adanya pemeliharaan peralatan; dan (6) adanya perbaikan peralatan yang rusak/using.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Indriasari dan Nahartoyo (2008), kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi/kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Instrumen pertanyaan tersebut antara lain mengenai (1) memiliki staf yang berkualifikasi dalam jumlah cukup; (2) memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas; (3) memiliki peran dan tanggungjawab yang ditetapkan dalam peraturan daerah; (4) memiliki uraian tugas yang sesuai dengan fungsi akuntansi; (5) memiliki pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi; (6) melaksanakan proses akuntansi; (7) mengadakan pelatihan pengembangan keahlian; dan (8) mengalokasikan dana-dana untuk sumber daya, peralatan dan pelatihan.

Pengendalian Intern (PIN)

Menurut Indriasari dan Nahartoyo (2008), bagian dari pengendalian intern yang meliputi rencana organisasi, prosedur, dan catatan yang dirancang untuk menjaga ketepatan pelaporan keuangan. Instrumen pertanyaan tersebut antara lain mengenai (1) sistem akuntansi keuangan; (2) sistem akuntansi aset tetap; (3) sistem akuntansi biaya; (4) laporan keuangan telah *direview* oleh satuan pemeriksaan intern atau aparat pengawasan intern kementerian Negara/lembaga sebelum disampaikan kepada entitas; (5) pelaporan setiap transaksi yang terjadi harus didukung dengan bukti transaksi yang sah; dan (6) adanya pemisahan tugas dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Variabel Pemoderasi

Pengawasan (PWS)

Yosa (2010), mengemukakan bahwa pengawasaan merupakan usaha yang dilakukan seseorang secara sistematis guna menetapkan standar kinerja, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja yang telah ditetapkan, untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi, dan untuk memperbaiki serta menjamin sumber daya pemerintahan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dari organisasi pemerintah daerah. Instrumen pertanyaan tersebut antara lain mengenai (1) pengawasan dilakukan secara efektif dan efisien; (2) evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; (3) setiap transaksi keuangan berdasarkan bukti yang cukup; (4) pencatatan transaksi diklarifikasikan dengan benar; (5) bukti-bukti diarsipkan/didokumentasikan dengan baik; (6) terdapat sistem pengawasan terhadap setiap pelaksanaan tugas; dan (7) laporan keuangan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan serta disusun secara tepat waktu.

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kuantitatif dengan menggunakan model analisis regresi melalui bantuan *SPSS (Statistical Product and Service Solution)*.

Uji Asumsi Klasik

Penelitian yang menggunakan model regresi harus mempunyai beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk menghasilkan *estimator linier* yang tidak bias. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain ; uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji kelayakan model.

Analisis Regresi

Menurut Ghozali (2013: 229), *Moderated Regression Analysis* (MRA) adalah pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator. Langkah-langkah analisis regresi variabel moderasi dengan uji interaksi dapat diuraikan sebagai berikut: Meregresikan variabel independen (X), variabel moderasi (Z) dan variabel interaksi (X.Z) terhadap variabel dependen (Y) sehingga akan diperoleh persamaan berikut ini :

$$KLP = \alpha + b_1PPR + b_2KOR + b_3PTI + b_4SDM + b_5PIN + \\ b_6PPR.PWS + b_7KOR.PWS + b_8PTI.PWS + b_9SDM.PWS + \\ b_{10}PIN.PWS$$

Keterangan :

KLP = Kualitas Laporan Keuangan

α = Konstanta

$b_{1...10}$, = Koefisien regresi

PPR = Pemahaman Peraturan

KOR = Komitmen Organisasi

PTI = Pemanfaatan Teknologi Informasi

SDM = Kompetensi Sumber Daya Manusia

PIN = Pengendalian Internal

PPR.PWS = Interaksi antara Pemahaman Peraturan dengan pengawasan

KOR.PWS = Interaksi antara Komitmen Organisasi dengan pengawasan

PTI.PWS = Interaksi antara Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan pengawasan

SDM.PWS = Interaksi antara Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan pengawasan

PIN.PWS = Interaksi antara Pengendalian Internal dengan pengawasan

e = *Error Term*

Uji Kelayakan Model (Uji-F)

Ghozali, (2016:96) mengatakan bahwa uji F digunakan untuk dapat menguji kelayakan model yang akan dihasilkan dengan menggunakan uji kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan uji kelayakan model pada tingkat α sebesar 5%. Menurut Ghazali (2011:96) dasar dari pengambilan keputusan yaitu dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi yakni (1) jika nilai signifikan uji F >

0,05 maka model yang digunakan dalam penelitian ini tidak layak atau tidak dapat dipergunakan dalam suatu analisis yang berikutnya dan (2) jika nilai signifikan uji $F < 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat dipergunakan dalam analisis berikutnya.

Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 2007: 97). Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria (1) jika nilai signifikansi $t < 0,05$, maka diputuskan H_0 ditolak dan H_1 diterima dan (2) jika nilai signifikansi $t > 0,05$, maka diputuskan H_0 diterima dan H_1 ditolak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Data penelitian diperoleh dari penyebaran kuesioner sebanyak 115 kuesioner kepada 22 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan diterima langsung oleh masing-masing sekretariat serta dibagikan langsung kepada responden. Rata-rata persepsi responden atas variabel pemahaman peraturan dengan nilai rata-rata sebesar 3,47. Pengungkapan secara lengkap atas informasi laporan keuangan merupakan indikator yang memiliki persepsi tertinggi dengan nilai rata-rata sebesar 3,64. Rata-rata persepsi responden atas variabel komitmen organisasi dengan nilai rata-rata sebesar 3,45. Perlunya pendidikan yang berkelanjutan dalam internal OPD untuk menghadapi perubahan lingkungan yang semakin kompleks, merupakan indikator yang memiliki persepsi tertinggi dengan nilai rata-rata sebesar 3,59. Rata-rata persepsi responden atas variabel pemanfaatan teknologi informasi dengan nilai rata-rata sebesar 3,17. *Software* sesuai peraturan perundangan merupakan indikator yang memiliki persepsi tertinggi dengan nilai rata-rata sebesar 3,36. Rata-rata persepsi responden atas variabel kinerja pegawai pemerintah dengan nilai rata-rata sebesar 3,32. Menganggarkan dana-dana untuk sumber daya, peralatan dan pelatihan, merupakan indikator yang memiliki persepsi tertinggi dengan nilai rata-rata sebesar 3,68. Rata-rata persepsi responden atas variabel pengendalian intern dengan nilai rata-rata sebesar 3,19. Sistem akuntansi aset tetap, merupakan indikator yang memiliki persepsi tertinggi dengan nilai rata-rata sebesar 3,30. Rata-rata persepsi responden atas variabel pengawasan pemerintah dengan nilai rata-rata sebesar 3,52. Setiap transaksi keuangan berdasarkan bukti yang cukup, merupakan indikator yang memiliki persepsi tertinggi dengan nilai rata-rata sebesar 3,69. Rata-rata persepsi responden atas variabel kualitas laporan keuangan dengan nilai rata-rata sebesar 3,49. Penyampaian Laporan Semesteran paling lambat tanggal 10 setelah semester berakhir, merupakan indikator yang memiliki persepsi tertinggi dengan nilai rata-rata sebesar 3,69.

HASIL UJI INSTRUMEN

Hasil Uji Validitas

Hasil pengujian validitas terlihat bahwa semua butir pernyataan yang mengukur variabel pemahaman peraturan, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, pengendalian intern, pengawasan dan kualitas laporan keuangan adalah valid karena r Hitung $>$ nilai r Tabel sebesar 0,207.

Hasil Uji Reliabilitas

Hasil pengujian menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel sudah reliabel, karena nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel $>$ 0,60, sehingga dapat dikatakan reliabel.

Hasil Analisis Regresi Moderasi

Hasil *Moderated Regression Analysis* dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{KLP} = 0,293 + 0,538\text{PPR} + 0,501\text{KOR} + 0,283\text{PTI} + 0,348\text{SDM} + 0,660\text{PIN} + 0,310\text{PWS} + 0,386\text{PPR*PWS} + 0,660\text{KOR*PWS} + 0,574\text{PTI*PWS} + 0,753\text{SDM*PWS} + 0,601\text{PIN*PWS} + e$$

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha=5\%$), berikut hasil pengujian hipotesis:

1. Pengujian hipotesis pengaruh variabel pemoderasi pengawasan terhadap pemahaman peraturan dan kualitas laporan keuangan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,386 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai signifikansi lebih kecil dari Los (Level of Significance) 0,05 ($\alpha = 5\%$) maka ditolak ($0,000 < 0,05$), yang berarti pengawasan mampu memoderasi pengaruh pemahaman peraturan terhadap kualitas laporan keuangan secara signifikan.
2. Pengujian hipotesis pengaruh variabel pemoderasi pengawasan terhadap komitmen organisasi dan kualitas laporan keuangan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,660 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,009 dimana nilai signifikansi lebih kecil dari Los (Level of Significance) 0,05 ($\alpha = 5\%$) maka ditolak ($0,039 < 0,05$), yang berarti pengawasan mampu memoderasi pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan secara signifikan.
3. Pengujian hipotesis pengaruh variabel pemoderasi pengawasan terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan pada diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,574 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,032 dimana nilai signifikansi lebih kecil dari Los (Level of Significance) 0,05 ($\alpha = 5\%$) maka ditolak ($0,032 < 0,05$), yang berarti pengawasan mampu

memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan secara signifikan.

4. Pengujian hipotesis pengaruh variabel pemoderasi pengawasan terhadap kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan pada diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,753 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,024 dimana nilai signifikansi lebih kecil dari Los (Level of Significance) 0,05 ($\alpha = 5\%$) maka ditolak ($0,000 < 0,05$), yang berarti pengawasan mampu memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan secara signifikan.
5. Pengujian hipotesis pengaruh variabel pemoderasi pengawasan terhadap pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan pada diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,601 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai signifikansi lebih kecil dari Los (Level of Significance) 0,05 ($\alpha = 5\%$) maka ditolak ($0,000 < 0,05$), yang berarti pengawasan mampu memoderasi pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan secara signifikan.

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Peraturan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil hipotesis pertama menyatakan bahwa pemahaman peraturan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan hipotesis pertama penelitian terbukti. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikan sebesar 0.011. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dasmaran et al, (2017); Putri, (2017); Defitri, (2018), dengan hasil pengujian yang menyatakan bahwa dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah, maka secara tidak langsung laporan keuangan akan mengikuti alur dari sistem baik manual ataupun yang sudah terkomputerisasi. Pemahaman peraturan dalam penyusunan laporan keuangan yang baik maka akan dapat menghasilkan informasi akuntansi atau laporan keuangan yang handal dan relevan. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah daerah. Pemahaman terhadap sistem akuntansi untuk dapat memahami dengan baik penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil hipotesis kedua menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan hipotesis kedua penelitian terbukti. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikan sebesar 0.033. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al., (2017); Arif, (2017); dan Rini et al., (2019), dengan hasil pengujian yang menyatakan bahwa dengan adanya dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan sendiri. Komitmen organisasional dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Karyawan yang komit terhadap organisasi akan menunjukkan sikap dan perilaku positif terhadap organisasinya. Karyawan akan menumbuhkan loyalitas tinggi terhadap organisasinya untuk tetap membela organisasinya, berusaha meningkatkan prestasi, dan memiliki keyakinan yang pasti untuk membantu mewujudkan tujuan organisasi. Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka, yaitu Komitmen normatif melalui moralitas personal (normative commitment through morality) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan dan komitmen normatif melalui legitimasi (normative commitment through legitimacy) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil hipotesis ketiga menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan hipotesis ketiga penelitian terbukti. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikan sebesar 0.028. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlilah., (2014); Setyowati et al., (2016); dan Putri, (2017), dengan hasil pengujian yang menyatakan bahwa semakin tepat pemanfaatan teknologi informasi yang ada oleh pemerintah merupakan salah satu manfaat yang dapat mengurangi kesalahan yang terjadi pada penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya teknologi informasi membantu pemerintah daerah untuk dapat mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang digunakan untuk dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada layanan

publik. Pemanfaatan teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan data transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya menjadi tepat waktu. Ditinjau dari total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Untuk itu pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang telah diatur menurut PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan pemerintah daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada layanan publik.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil hipotesis keempat menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan hipotesis keempat penelitian terbukti. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikan sebesar 0.000. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyowati et al., (2016); Putri, (2017); dan Nugroho, (2018), dengan hasil pengujian yang menyatakan bahwa. dalam menciptakan kinerja pegawai yang baik, pemerintah harus memiliki kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, disyaratkan dan di dukung oleh latar belakang pendidikan, pelatihan, pengalaman, sikap, dan keterampilan di bidangnya. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang sesuai dengan pemahaman sistem akuntansi yang baik maka akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan ketepatan waktu dalam pembuatannya. Kompetensi sumber daya manusia penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan sehingga laporan keuangan yang disusun berkualitas. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap ketepatan pelaporan keuangan kapasitas sumber daya manusia dapat terlihat dari tingkat tanggung jawab yang diberikan kepadanya, yang mana tanggungjawab tersebut diuraikan didalam job description. Dalam pengelolaan keuangan, OPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang didukung oleh latar belakang pendidikan akuntansi, pengalaman kerja di bidang keuangan dan mengikuti pelatihan kerja. Kualitas sumber daya manusia adalah suatu kesatuan tenaga manusia sebagai suatu sistem di mana tiap-tiap karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan informasi serta diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai.

Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil hipotesis kelima menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan hipotesis kelima penelitian terbukti. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikan sebesar 0.005. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Surastiani dan Handayani, (2015); Sari et al., (2017); dan Nugroho, (2018), dengan hasil pengujian yang menyatakan bahwa dengan adanya pengendalian intern yang diberlakukan sesuai dengan peraturan maka dapat memberikan suatu keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang dapat digambarkan dengan kualitas laporan keuangan yang baik. Selain itu semakin efektif pengendalian internal diterapkan dalam suatu instansi pemerintah maupun swasta maka semakin rendah kecurangan akuntansi yang terjadi, keefektifan pengendalian merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan manajemen untuk memastikan (secara memadai, bukan mutlak) tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan dari pengendalian internal adalah agar kegiatan operasional perusahaan berjalan secara efektif dan efisien sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Semakin sesuai sistem pengendalian internal dengan tujuannya, semakin sederhana deteksi fraud yang perlu dilakukan. Artinya jika sistem pengendalian internal dalam instansi sudah berjalan efektif, maka kemungkinan kecurangan (fraud) yang terjadi juga akan semakin kecil. Semakin efektif suatu pengendalian internal pada suatu entitas, maka akan semakin rendah tingkat terjadinya fraud. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengawasan dalam Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui pengaruh variabel pengawasan dalam memoderasi variabel pemahaman peraturan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,386, nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel pengawasan dalam memoderasi pengaruh pemahaman peraturan terhadap kualitas laporan keuangan. Yang berarti ruang lingkup sistem akuntansi keuangan daerah mencakup kebijakan sistem akuntansi, prosedur sistem akuntansi, sumber daya manusia dan teknologi informasi dan menunjukkan hasil bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang efektif akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Namun selain sistem akuntansi hal yang tidak dapat dipisahkan dalam memperoleh kualitas laporan keuangan yang baik yaitu pengawasan

keuangan. Pengawasan merupakan suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintah.

Pengawasan dalam Memoderasi Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui pengaruh variabel pengawasan dalam memoderasi variabel komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,660, nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel pengawasan dalam memoderasi pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan. Yang berarti komitmen organisasi merupakan suatu pengikat, yang memberi pengaruh pada tujuan dan nilai, serta kepentingan pada organisasi, terlepas dari instrumental yang semata-mata cukup, ditinjau dari konsep menurut tiga dimensi, yaitu identifikasi, keterlibatan, dan kesetiaan. Komitmen organisasi terbentuk pada dasarnya adanya komitmen karyawan (individu). Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jaros (2007) mengungkapkan komitmen organisasional dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi.

Pengawasan dalam Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui pengaruh variabel pengawasan dalam memoderasi variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,574, nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel pengawasan dalam memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Yang berarti dengan adanya teknologi informasi membantu pemerintah daerah untuk dapat mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang digunakan untuk dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dan

menyalurkan informasi keuangan daerah kepada layanan publik. Dampak positif dari pemanfaatan teknologi informasi secara umum dapat menambah efisiensi waktu dan biaya serta memberikan keuntungan ekonomis yang tinggi jika teknologi di manfaat secara optimal. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi yang diharapkan.

Pengawasan dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui pengaruh variabel pengawasan dalam memoderasi variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,753, nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel pengawasan dalam memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Yang berarti sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Namun kurangnya organisasi untuk mengembangkan sumber daya manusia mereka, maka perlu diberikan pelatihan dan pengembangan yang membuat karyawan dapat melaksanakan pekerjaan mereka saat ini secara efektif dan mempersiapkan pekerjaan di masa mendatang. Pengawasan merupakan bagian penting dalam praktik pengawasan dalam kinerja sumber daya manusia pada pemerintahan, karena dengan diberlakukannya pengawasan maka dapat dilakukan evaluasi dan diharapkan dapat memberi rekomendasi mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan (Putra, 2018).

Pengawasan dalam Memoderasi Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui pengaruh variabel pengawasan dalam memoderasi variabel pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,601, nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel pengawasan dalam memoderasi pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas pelaporan keuangan. Yang berarti melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Pengawasan dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan, maka diharapkan dapat membantu dalam mengelola keuangan pemerintahan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pemahaman peraturan dalam penyusunan laporan keuangan yang baik maka akan dapat menghasilkan informasi akuntansi atau laporan keuangan yang handal dan relevan; pegawai yang memiliki komitmen terhadap instansi maka dapat ditunjukkan sikap dan perilaku pegawai yang positif. Pegawai yang memiliki loyalitas tinggi terhadap instansinya maka akan berusaha untuk tetap membela instansinya, berupaya untuk meningkatkan prestasi dan membantu instansinya untuk dapat meraih tujuan instansi yang hendak dicapai; semakin tepat pemanfaatan teknologi informasi yang ada oleh pemerintah merupakan salah satu manfaat yang dapat mengurangi kesalahan yang terjadi pada penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya teknologi informasi membantu pemerintah daerah untuk dapat mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang digunakan untuk dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada layanan publik; Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang sesuai dengan pemahaman sistem akuntansi yang baik maka akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan kualitas dalam pembuatannya; semakin efektif pengendalian intern diterapkan dalam suatu instansi pemerintah maupun swasta maka semakin rendah kecurangan akuntansi yang terjadi, keefektifan pengendalian merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan manajemen untuk memastikan (secara memadai, bukan mutlak) tercapainya tujuan dan sasaran organisasi; pengawasan merupakan sesuatu yang hendak diharapkan secara sistematis dalam menetapkan standar kinerja pada perencanaan yang dirancang untuk sistem umpan balik informasi, sehingga dapat dibandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, dalam mengambil keputusan untuk menetapkan apakah terdapat penyelewengan, sehingga diperlukan suatu tindakan evaluasi untuk mengetahui tujuan organisasi telah tercapai secara efektif dan efisien; pengawasan maka dapat meminimalisir kelalaian dalam pembuatan pelaporan keuangan daerah, sehingga dalam menyusun dan penerapan kebijakan dapat dilakukan dengan tertib dan meningkatkan komitmen terhadap kompetensi yang dimiliki oleh pegawai; pemanfaatan teknologi yang baik oleh pemerintah merupakan salah satu manfaat yang dapat mengurangi kesalahan yang terjadi pada peningkatan kinerja pegawai pemerintah; pengawasan merupakan bagian penting dalam praktik pengawasan dalam kinerja sumber daya manusia pada pemerintahan, karena dengan diberlakukannya pengawasan maka dapat dilakukan evaluasi dan diharapkan memberikan rekomendasi mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan; dan melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu keterbatasan dalam penelitian ini menunjukkan variabel kualitas laporan keuangan yang diteliti hanya dijelaskan oleh variabel independen sebesar 32,3%, berarti ada variabel lain sebesar 66,7% diluar model. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti pengaruh variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam model regresi pada penelitian ini seperti variabel performa keuangan, kemandirian, opini dan kesesuaian kompensasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, M. A. 2018. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Pemerintah Kabupaten Bantul). *Jurnal Ekobis Dewantara*. 1 (12): 66-77.
- Defitri, S. Y. 2018. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*. 3 (1): 64-75.
- Ghozali, I. 2010. *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2011 *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS*. 21. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Indriasari, D. dan E. Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). *Simposium Nasional Akuntansi XI*. Pontianak
- Nugroho, B. S. 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali). *Publikasi Ilmiah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 18 Tahun 2016. *Tentang Perangkat Daerah*.
- Pujanira, P. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Jurnal Nominal*. 6 (2) : 14-28.
- Putri, A. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi). *Jurnal Fekon*. 4 (1): 699-7

